

KRITERIA *BEST PRACTICE*
FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024

KRITERIA *BEST PRACTICE*
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2024

Best practice merupakan landasan bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam penyelenggaraan dan pengelolaan institusi. Landasan ini digunakan untuk mewujudkan prinsip *Good University Governance*. Adapun kriteria *best practice* pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan fakultas dan program studi.
- Fakultas Hukum menjunjung tinggi partisipasi seluruh *stakeholders* guna peningkatan kualitas institusi.
- Fakultas Hukum menekankan pada keterbukaan informasi dalam pengelolaan fakultas dan program studi.

2. Kredibilitas

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjamin kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan institusi.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara berkala melakukan pembaharuan terhadap substansi pembelajaran, peningkatan kualitas penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara berkala meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan.

3. Akuntabilitas

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menekankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program studi yang terintegrasi.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja institusi secara berkala.

4. Bertanggungjawab

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki susunan organisasi dan tata kelola kinerja yang bersifat hierarkis serta didasarkan pada prinsip tanggungjawab.

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menekankan pada prinsip tanggungjawab melalui adanya mekanisme pelaporan terhadap kinerja institusi dan laporan keuangan untuk setiap kegiatan.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki sistem tata kelola yang jelas dengan adanya *manual procedure*.

5. Berkeadilan

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menerapkan *merit system* dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program studi.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya menekankan prinsip inklusivitas.

Demikian *best practice* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 April 2024

Dekan



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. *RS*
NIP. 196711191993032002